Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 16, Nomor 3, September 2025
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Dampak Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Subsidi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

The Impact of Personnel Expenditure, Goods Expenditure, Capital Expenditure, and Subsidies on Tax Revenue Realization in Indonesia

Nabila Nabila, Yani Rizal*), Puti Andiny, Muhammad Fuad, Safrizal Safrizal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Indonesia
**e-mail korespondensi: yanirizal@unsam.ac.id*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 16 Juli 2025
Disetujui: 01 Agustus 2025
Dipublikasikan: September 2025

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v16i3.12651

Cara Mensitasi :
Nabila, N., Rizal, Y., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal,S. (2025). Dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(3), 692-706. DOI: 10.33059/jseb.v16i3.12651.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan analisis dilakukan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) dengan bantuan Eviews 10. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berdampak dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang ditemukan berdampak positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Belanja barang dalam jangka pendek memiliki berdampak negatif dan signifikan, sedangkan pada jangka panjang tidak berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak. Belanja modal menunjukkan dampak positif dan signifikan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap realisasi penerimaan pajak. Di sisi lain, subsidi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak baik pada jangka pendek dan jangka panjang.

Kata Kunci: Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Penerimaan Pajak, Subsidi.

Article Info

Article History :
Received: 16 July 2025
Accepted: 01 August 2025
Published: September 2025

DOI Number :
10.33059/jseb.v16i3.12651

How to Cite :
Nabila, N., Rizal, Y., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal,S. (2025). Dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(3), 692-706. DOI: 10.33059/jseb.v16i3.12651.

Abstract

The study analyzes the impact of employee spending, goods spending, capital spending, and subsidies on tax revenue realization in Indonesia. This study uses a quantitative approach based on secondary data from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the analysis was conducted using the Error Correction Model (ECM) method with the help of Eviews 10. The results indicate that employee spending has no impact in the short term, but in the long term, a positive and significant impact was found on tax revenue realization. Goods spending in the short term has a negative and significant impact, while in the long term it has no impact on tax revenue realization. Capital spending shows a positive and significant impact in both the short and long term on tax revenue realization. On the other hand, subsidies do not have a significant impact on tax revenue in either the short or long term.

Keywords: *Goods Expenditure, Capital Expenditure, Employee Expenditure, Tax Revenue, Subsidies*.

2614-1523/©2025 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

PENDAHULUAN

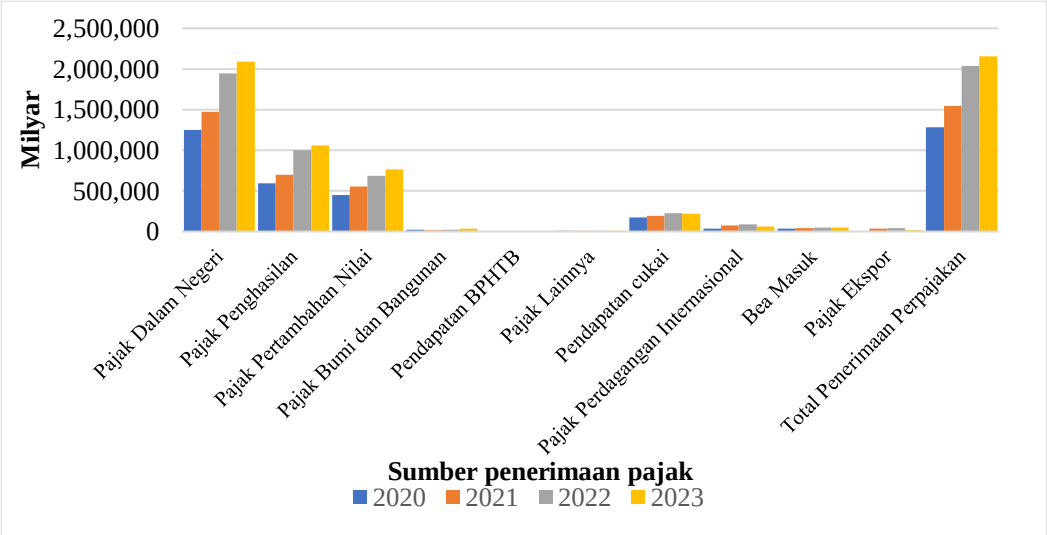
Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik dalam suatu negara. Salah satu kebijakan utama yang dijalankan adalah kebijakan fiskal, yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Hasibuan *et al*., 2024). Instrumen utama dalam kebijakan fiskal meliputi penerimaan negara dari sektor perpajakan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia tercermin melalui berbagai program dan kegiatan pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 APBN terdiri atas tiga instrumen utama, yaitu belanja negara, pembiayaan, dan pendapatan negara, dengan pajak sebagai sumber utama penerimaan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastuktur serta peningkatan perekonomiaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Prawitasari *et al*., 2025). Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, berdasarkan undang-undang sifatnya memaksa, tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Peran pajak diperkirakan semakin krusial di masa depan dalam menyeimbangakan pengeluaran negara dan penerimaan negara sehingga menciptakan surplus anggaran yang dapat digunakan untuk membayar utang. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan perpajakan memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kemakmuran rakyat (Meiliawati, 2013).

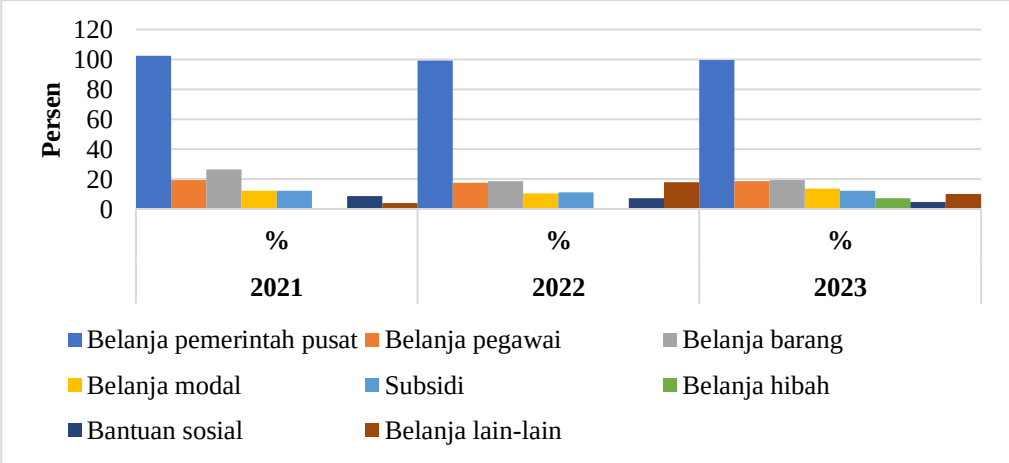
Dalam laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), realisasi menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp 1.285.136 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.154.208 miliar pada tahun 2023 yang mencakup penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Selama periode tersebut, penerimaan perpajakan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Pada gambar tersebut dapat dilihat pada periode 2020-2023 bahwa perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang secara agregat membentuk total penerimaan pajak nasional. Data itu menunjukkan tren peningkatan penerimaan pajak setiap tahun, menegaskan peran sentral pajak sebagai penopang utama penerimaan negara. Hingga saat ini, kontribusi perpajakan terhadap total penerimaan negara melampaui 75 persen, sejalan dengan kondisi di banyak negara lain dimana pajak menjadi sumber pendapatan utama (Kemenkeu, 2024).

Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyedian barang dan jasa publik. Kebijakan pengeluaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mencerminkan peran aktif pemerintah pada aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, khususnya dalam belanja negara, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa publik (Azwar, 2016). Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja pemerintah diklasifikasikan menurut jenisnya (sifat ekonomi), yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dapat diketahui proporsi masing-masing jenis belanja terhadap total belanja pemerintah pusat selama periode 2021-2023, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 bahwa proporsi jenis belanja pemerintah pusat terus mengalami fluktuasi. Meskipun anggaran belanja pemerintah cukup besar, belum tentu secara langsung menghasilkan peningkatan penerimaan perpajakan.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)



Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Negara Republik Indonesia (dalam milyaran rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah), 2024.



Gambar 2. Belanja Negara Republik Indonesia (dalam milyaran rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah), 2024.

Gambar 2 lebih jauh menunjukkan empat jenis belanja dengan proporsi terbesar terhadap total belanja pemerintah pusat selama periode tersebut adalah belanja barang, belanja pegawai, subsidi, dan belanja modal. Belanja barang memiliki proporsi tertinggi, yakni 26,49 persen pada tahun 2021, 18,69 persen pada tahun 2022, dan 19,32 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, belanja pegawai masing-masing berkontribusi sebesar 19,38 persen, 17,65 persen, dan 18,43 persen pada tahun 2021 sampai 2023. Sementara itu, subsidi tercatat sebesar 12,10 persen pada tahun 2021, 11,09 persen pada tahun 2022, dan 12,04 persen pada tahun 2023. Terakhir, belanja modal menunjukkan proporsi sebesar 12,00 persen pada tahun 2021, 10,55 persen pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 13,53 persen pada tahun 2023.

Memahami hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak penting untuk mengevaluasi distribusi sumber daya dalam perekonomian (Anugra & Marwa, 2016). Pengetahuan ini diperlukan khususnya dalam mengatasi defisit fiskal. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai belanja rekonstruksi, penyediaan layanan publik, serta memperkuat manajemen publik. Merujuk pada uraian latar belakang, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apakah terdapat dampak dari komponen belanja pemerintah, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan subsidi, terhadap

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

penerimaan pajak dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara masing-masing jenis belanja tersebut dengan penerimaan pajak negara. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data runtun waktu (*time series*), menggunakan data laporan APBN yang mencakup periode yang lebih luas dan bersifat terkini.

Salah satu kontribusi orisinal dari penelitian ini adalah dimasukkannya variabel subsidi yang sering disebut juga 'pajak negatif' sebagai bagian dari pengujian. Subsidi merupakan komponen yang unik dalam struktur pengeluaran pemerintah, dimana berbeda dengan jenis pengeluaran lain seperti belanja pegawai — yang masyaratkan adanya timbal balik berupa kinerja atau jasa dari pegawai sebelum menerima kompensasi — subsidi diberikan tanpa adanya timbal balik langsung kepada pemerintah. Meskipun demikian, alokasi anggaran untuk subsidi cenderung besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: "apakah subsidi memiliki peran dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak, ataukah hanya menjadi beban fiskal tanpa kontribusi nyata terhadap pendapatan negara?" Faktor subsidi juga diidentifikasi belum banyak mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

TELAAH LITERATUR

Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembelian barang dan jasa. Bentuk pengeluaran ini mencakup penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji aparatur negara, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan keamanan melalui lembaga militer dan kepolisian (Maulia *et al*., 2024; Thamrin, 2019). Teori utama penelitian ini adalah *The Spend-Tax Hypothesis* yang dikemukakan oleh Peacock & Wiseman (1961). Teori ini menyatakan bahwa pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluaran pemerintah, disisi lain masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemmerintah yang terus meningkat. Teori ini mendasari bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak yakni batas dimana masyarakat dapat menerima besarnya pungutan pajak yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah agar masyarakat mempunyai tingkat kemauan membayar pajak. Dengan demikan, Berdasarkan teori ini disadari adanya keterkaitan antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak.

Pajak merupakan pungutan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikenakan oleh pemerintah atas penduduk atau barang, dengan tujuan memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara (Pamuji & Nasihuddin, 2020). Pajak merupakan kontribusi wajib dari perorangan atau badan hukum untuk kebutuhan negara. Definisi ini mencerminkan tiga unsur utama, yaitu adanya unsur pemaksaan, subjek pajak berupa orang atau badan hukum, serta tujuan penggunaan untuk kepentingan publik. Proses perpajakan mencakup pemungutan, pengumpulan, dan pembayaran pajak (Fillebrown, 1914). Penerimaan negara mencakup seluruh pendapatan pemerintah dalam arti luas, termasuk penerimaan pajak, hasil penjualan barang dan jasa milik pemerintah, pinjaman, pencetakan uang, serta sumber-sumber lainnya (Basri & Subri, 2005). Dari berbagai sumber penerimaan negara, pajak merupakan kontributor terbesar, dengan kontribusi yang diperkirakan melebihi 75 persen dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan determinan utama pengeluaran pemerintah, yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan mendorong terciptanya efek pengganda terhadap pendapatan nasional (Wahyuni *et al*., 2024). Jenis belanja pemerintah mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara baik di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan pengecualian bagi pekerjaan berkaitan pembentukan modal. Dalam perspektif Keynesian, pengeluaran pemerintah termasuk belanja pegawai memiliki dampak langsung terhadap permintaan agregat. Keynes (1936) menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan pendapatan nasional, terutama di tengah kondisi pengangguran yang tinggi. Belanja belanja pegawai yang lebih besar bisa meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan akhirnya memperbesar pendapatan nasional. Peningkatan ini kemudian berkontribusi pada kenaikan penerimaan pajak, baik melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun jenis pajak lainnya (Aruan *et al*., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan *et al*. (2020) serta Kurniawan & Irmawati (2021) yang menemukan bahwa belanja pemerintah termasuk belanja pegawai memiliki dampak terhadap penerimaan pajak. Belanja pemerintah menghasilkan respon positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan dari hasil telaah, maka hipotesis pertama yang dimunculkan yaitu:

H1: Belanja pegawai pada jangka pendek maupun jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang bersifat habis pakai, mendukung operasional kegiatan, memproduksi barang dan jasa baik yang dipasarkan maupun tidak, serta pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, tidak termasuk belanja bantuan sosial dan perjalanan dinas. Belanja barang pemerintah, seperti pembelian alat tulis, kertas, dan bahan bakar untuk kendaraan dinas, secara tidak langsung bisa mendorong permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional, yang akhirnya meningkatkan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jenis pajak lainnya (Thamrin, 2019). Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa belanja pemerintah berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak (Uche & Ogbonna, 2018; Hondroyiannis & Papapetrou, 1996). Berdasarkan dari hasil telaah, maka hipotesis kedua yang dimunculkan yaitu:

H2: Belanja barang pada jangka pendek maupun jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk perolehan atau peningkatan nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batas kapitalisasi minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal pemerintah untuk investasi dalam bentuk aset tetap, seperti infrastruktur, secara langsung meningkatkan pengeluaran agregat (Abiad *et al*., 2016). Peningkatan investasi itu bisa mendorong kenaikan pendapatan nasional. Dalam tahap awal proses multiplier, pertambahan belanja pemerintah menghasilkan peningkatan pendapatan nasional dalam jumlah yang sama. Dengan demikian, nilai *multiplier* dari perubahan investasi setara dengan nilai *multiplier* dari perubahan pengeluaran pemerintah (Haug & Sznajderska, 2024). Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa belanja modal dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdampak terhadap penerimaan pajak (Maulid *et al*., 2021; Efuntade *et al*., 2020). Berdasarkan hasil telaah, maka hipotesis ketiga yang dimunculkan yaitu:

H3: Belanja modal pada jangka pendek maupun jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Subsidi adalah alokasi anggaran pemerintah bagi perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang dianggap strategis untuk kebutuhan masyarakat, dengan tujuan menjaga agar harga jual tetap terjangkau. Belanja subsidi memiliki dampak dua arah terhadap anggaran negara (Ramdani, 2024). Di satu sisi, subsidi mendorong permintaan terhadap barang atau jasa yang dapat meningkatkan penerimaan negara; di sisi lain, menambah beban pengeluaran pemerintah. Subsidi kerap disebut sebagai ”pajak negatif” karena berbeda dengan pajak yang menarik dana dari masyarakat, sebaliknya subsidi justru menyalurkan dana atau manfaat kepada masyarakat. Subsidi dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun barang, yang memungkinkan konsumen memperoleh produk tertentu dengan harga dibawah harga pasar (Basri & Subri, 2005). Argumen ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa subsidi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Uche & Ogbonna, 2018; Hondroyiannis & Papapetrou, 1996; Kurniawan *et al*., 2020). Berdasarkan hasil telaah, maka hipotesis yang muncul sebagai berikut:

H4: Subsidi pada jangka pendek dan jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif berupa data realisasi APBN periode tahun 2005-2023 dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.dja.dev.mitrekasolusi.co.id/ data-series). Dari data tersebut digunakan satu variabel dependen yaitu total penerimaan pajak, serta empat variabel independen mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi. Proses pengujian menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) yang diolah menggunakan *software Eviews*-10 (Hamid *et al*., 2020). Uji ECM bertujuan mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang yang muncul akibat adanya kointegrasi antar variabel (Basuki & Prawoto, 2016). Model ECM pada jangka pendek dalam penelitian ini diformulasikan:

$$Pajak = \beta_0 + \beta_1(pegawai)_t + \beta_2(Barang)_t + \beta_3(Modal)_t + \beta_4(Subsidi)_t + \mu_t$$

Berikutnya, dilakukan penyesuaian persamaan untuk model hubungan jangka pendek menjadi:

$$D(Pajak)_t = \alpha_0 + \alpha_1 D(pegawai)_t + \alpha_2 D(Barang)_t + \alpha_3 D(Modal)_t + \alpha_4(Subsidi)_t + ECT\ (-1) + \mu_t$$

Pengujian terhadap asumsi klasik mencakup beberapa tahapan. Pertama adalah uji normalitas yang menunjukkan data berdistribusi normal, apabila nilai probabilitasnya melebihi 0,05. Kedua yaitu uji multikoliniearitas yang ditunjukkan melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana tidak terdapat indikasi multikoliniearitas dalam model penelitian jika seluruh nilai VIF kurang dari 10. Ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dimana model penelitian dikatakan bebas jika nilai signifikan lebih besar dari nilai 0,05. Keempat yaitu uji autokorelasi, dimana model penelitian dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Basuki, 2017).

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk memastikan ada tidaknya dampak signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Bulkani, 2018). Kriteria pengujian hipotesis ditentukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value), dimana jika nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka dinyatakan terdapat dampak yang signifikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen; sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan terdapat dampak yang tidak signifikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

HASIL ANALISIS

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang dijalankan menunjukan bahwa data penelitian memenuhi kriteria untuk melanjutkan analisi regresi. Hasil uji normalitas dengan metode *Jarques-Bera* memperoleh nilai sebesar 0,583113 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti model regresi berdistribusi normal. Hasil uji multikoliniearitas memperoleh nilai VIF lebih kecil dari 10 atau tidak ditemukan multikoliniearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji heterokedatisitas dengan mengunakan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* memperoleh nilai *Prob.Chi-Square* sebesar 0,4900 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Hasil uji autokorelasi mengunakan metode *Breusch-Godprey Serial Correlation LM Test* juga menunjukkan nilai Prob.Chi-Square sebesar 0,6094 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti model penelitian ini tidak mengandung adanya persoalan autokorelasi. Dengan terpenuhinya semua uji asumsi klasik, maka model regresi penelitian ini dianggap valid untuk menguji dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan subsidi terhadap penerimaan pajak.

Sebelum menerapkan uji *Error Correction Model* (ECM), langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pengujian stasioneritas dan uji kointegrasi. Pengujian stasioner data dilakukan dengan uji akar unit (*unit root test*) (Smeekes & Wijler, 2019), sementara uji akar unit penelitian ini dilakukan menggunakan metode uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) *test*. Hasil uji pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel pajak, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi, bersifat stasioner pada tingkat *first-difference*, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji ADF yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Selanjutnya, dilakukan proses uji kointegrasi untuk tujuan mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan independen (Yussuf, 2022). Hasil pengujian kointegrasi yang dilakukan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) ditunjukkan dalam Tabel 2. Hasil pengujian untuk data ECT stasioner diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0491 atau kurang dari 0,05 serta nilai *t-statistic* diperoleh lebih besar dari nilai *critical value* atau 0,05 (Basuki & Prawoto, 2016; Yossinomita *et al*., 2024). Hasil ini mengindikasikan bahwa data tersebut menunjukkan adanya kointegrasi jangka panjang antara pajak sebagai variabel terikat dengan variabel-variabel independen (yaitu: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi).

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

Series	*Prob. Level*	*Prob. First Difference*
Pajak	0,8975	0,0003
Belanja Pegawai	0,6785	0,0382
Belanja Barang	0,9999	0,0016
Belanja Modal	0,9516	0,0000
Subsidi	0,1627	0,0029

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

Variabel	*Probability*	*t- statistic*	*MacKinnon Critical Value*		
			1 persen	5 persen	10 persen
ECT	0,0491	-3,062508	-3,886751	-3,052169	-2,666593

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Hasil *Error Correction Model* (ECM) untuk Periode Jangka Pendek

Setelah melalui uji stasioneritas dan kointegrasi, diketahui bahwa data bersifat stasioner pada tingkat *first-difference* dan memiliki hubungan kointegrasi jangka panjang. Oleh karena itu, tahap analisis selanjutnya adalah penerapan *Error Correction Model* (ECM) untuk mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang (Basuki & Prawoto, 2016). Hasil estimasi jangka pendek melalui model ECM terangkum dalam Tabel 3. Pada tabel tersebut diperoleh hasil estimasi regresi (*B = Beta*) ECM yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, tiga variabel independen yaitu belanja pegawai (B_1 = 2,764480), belanja modal (B_3 = 2,887942) dan subsidi (B_4 = 0,533318) memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak; hasil ini menunjukkan bahwa bila salah satu variabel independen tersebut mengalami perubahan (kenaikan/penurunan), dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak juga mengalami perubahan dalam arah yang sama (kenaikan/penurunan). Sebaliknya, belanja barang (B_2 = -2,572130) terbukti berdampak negatif; yang berarti bila belanja barang mengalami perubahan (kenaikan/penurunan), dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak mengalami perubahan dalam arah yang berlawanan (penurunan/kenaikan).

Tabel 3 juga menunjukkan nahwa dalam periode jangka pendek, variabel belanja barang (p_2 = 0,0004) dan belanja modal (p_3 = 0,0034) terbukti berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak, sementara belanja pegawai (p_1 = 0,2644) dan subsidi tidak menunjukkan dampak yang signifikan (p_4 = 0,0819). Temuan ini selaras dengan hasil studi milik Kurniawan & Irmawati (2021) yang menyatakan belanja barang berdampak signifikan dalam jangka pendek dan belanja pegawai tidak berdampak dalam jangka pendek karena terjadi *time lag.* Sementara itu, temuan riset milik Yossinomita *et al*. (2024) menyatakan belanja modal terbukti berdampak signifikan, sementara subsidi terbukti tidak signifikan terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Lebih jauh, hasil estimasi ECM yang diperoleh dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *Error Correction Term* (ECT) bersifat signifikan (*p-ECT* = 0,0018 < 0,05) dan bertanda negatif (B-ECT = -0,848319) yang menunjukkan validitas model; yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan dinamika hubungan jangka pendek antar variabel secara akurat. Nilai koefisien ECT sebesar -0,848319 mengindikasikan deviasi dari keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi sebesar -0,848319 setiap tahunnya agar sistem kembali menuju kondisi ekuilibrium.

Tabel 3. Hasil Estimasi Persamaan serta ECM Jangka Pendek

Variabel	*B (Beta)*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*p-value*
C	46240,14	55985,23	0,825935	0,4250
D(PEGAWAI)	2,764480	2,361115	1,170837	0,2644
D(BARANG)	-2,572130	0,528524	-4,866628	0,0004
D(MODAL)	2,887942	0,793497	3,639514	0,0034
D(SUBSIDI)	0,533318	0,280890	1,898674	0,0819
ECT(-1)	-0,848319	0,212021	-4,001110	0,0018
R-squared		0,752991		
Adjusted R-squared		0,650070		
S.E. of regression		85079,85		
S.D. dependent var		143825,6		

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 4. Hasil Estimasi Persamaan Jangka Panjang

Variabel	*B (Beta)*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*p-value*
C	8028.676	110800.6	0.072461	0.9433
D(PEGAWAI)	3.046110	1.223940	2.488773	0.0260
D(BARANG)	-0.606820	0.814212	-0.745285	0.4684
D(MODAL)	2.985438	1.273091	2.345032	0.0343
D(SUBSIDI)	0.206036	0.453390	0.454435	0.6565
R-squared		0.946378		
Adjusted R-squared		0.931058		
S.E. of regression		134878.8		
S.D. dependent var		513690.9		

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,650070 yang ditampilkan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa keempat variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan secara baik tentang variasi yang terjadi dalam penerimaan pajak dalam periode jangka pendek, yaitu mencapai besaran 65,01 persen. Hasil ini menyatakan juga bahwa dalam periode jangka pendek, tingkat penerimaan pajak terdampak oleh variabel-variabel lain yang berada diluar model penelitian ini sekitar 34,99 persen. Selain itu, *standard error model* sebesar 85079,85 adalah lebih kecil dari besaran standar deviasi variabel dependen sebesar 143825,6; kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi untuk periode jangka pendek ini layak digunakan sebagai alat prediksi (Gujarati *et al*., 2019).

Hasil *Error Correction Model* (ECM) untuk Periode Jangka Panjang

Hasil estimasi regresi jangka panjang dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel independen yaitu belanja pegawai (B_1 = 3.046110), belanja modal (B_3 = 2.985438) dan subsidi (B_4 = 0.206036) yang juga memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak seperti yang terjadi dalam jangka pendek; hasil ini menunjukkan bahwa bila salah satu variabel independen tersebut mengalami perubahan (kenaikan/penurunan), dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak berubah dalam arah yang sama (kenaikan/penurunan). Sebaliknya, belanja barang (B_2 = -0.606820) diperoleh juga seperti periode jangka pendek yaitu berdampak negatif; yang berarti bila belanja barang mengalami perubahan (kenaikan/penurunan), dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak mengalami perubahan dalam arah yang berlawanan (penurunan/kenaikan).

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa dalam periode jangka panjang, variabel belanja pegawai (p_1 = 0.0260) dan belanja modal (p_3 = 0.0343) terbukti berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak, sementara belanja barang (p_2 = 0.4684) dan subsidi tidak menunjukkan dampak yang signifikan (p_4 = 0.6565). Temuan ini sejalan dengan hasil riset Kurniawan *et al*. (2020, 2021) yang menunjukkan belanja pegawai dan belanja modal memberi kontribusi besar bagi peningkatan pajak, belanja modal sedangkan belanja barang kurang berdampak terhadap upaya meningkatkan pajak. Selain itu, studi makro dari Efuntade *et al*. (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun belanja pemerintah secara keseluruhan berdampak pada penerimaan pajak, tetapi tidak semua komponen individualnya berdampak terhadap penerimaan pajak; dimana salah satunya adalah subsidi seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian ini.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,931058 yang ditampilkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam periode jangka panjang, keempat variabel independen dalam penelitian ini sangat mampu menjelaskan secara baik tentang variasi yang terjadi dalam penerimaan pajak, yaitu mencapai besaran 93,11 persen. Hasil ini menyatakan juga dalam periode jangka panjang, tingkat penerimaan pajak juga terdampak oleh variabel-variabel lain yang berada diluar model penelitian ini walau dalam besaran yang relatif kecil yaitu sekitar 6,89 persen. Selain itu, *standard error model* sebesar 134878,8 adalah lebih kecil dari besaran standar deviasi variabel dependen sebesar 513690,9; kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi untuk periode jangka panjang ini layak digunakan sebagai alat prediksi (Gujarati *et al*., 2019).

Lebih jauh, apabila pembahasan mengenai dampak dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam periode jangka pendek maupun periode jangka dikombinasikan, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Hasil analisis untuk belanja pegawai pada periode jangka pendek diperoleh tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi dalam jangka panjang diidentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; dengan demikian bahwa hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berikutnya, hasil analisis untuk belanja barang pada periode jangka pendek diperoleh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi dalam jangka panjang diidentifikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak; dengan demikian bahwa hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil analisis untuk belanja modal pada periode jangka pendek diperoleh berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan dalam jangka panjang juga teridentifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; dengan demikian bahwa hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima atau dapat dibuktikan kebenarannya. Terakhir, hasil analisis untuk subsidi pada periode jangka pendek diperoleh tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sementara dalam jangka panjang diidentifikasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak; dengan demikian bahwa hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pembahasan

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai pada jangka pendek tidak berdampak secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga jika terjadi peningkatan ataupun penurunan pada belanja pegawai dalam jangka pendek maka tidak akan berdampak penerimaan pajak sama sekali. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian terdahulu dari Kurniawan & Irmawati (2021), Dybczak & Garcia-Escribano (2019) serta Waryanto (2017) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga tidak bisa meningkatkan penerimaan pajak, atau bahwa belanja pegawai tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor karena pada faktanya belanja pegawai yang dikeluarakan untuk pegawai pemerintah tidak semua dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) seperti pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan penghasilan dibawah ketentuan PPh pasal 21. Penghasilan pegawai yang tidak dikenai PPh itu dapat dipungut dari pajak PPN barang yang dibelanjakan oleh pegawai, dan hal ini yang membuat terjadinya jeda waktu *(time lag)* pada penerimaan pajak.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Pada jangka panjang, belanja pegawai ditemukan berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini berarti jika belanja pegawai mengalami kenaikan pada jangka panjang maka penerimaan pajak juga bisa meningkat, sebaliknya jika belanja pegawai dalam jangka panjang mengalami penurunan maka penerimaan pajak juga ikut menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai dalam jangka panjang memiliki peran penting terhadap penerimaan pajak, sesuai dengan argumen empiris dari Fitri & Putri (2019) yang menunjukkan belanja pegawai memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh, yang kemudian memberikan dampak pada penerimaan pajak. Penyaluran belanja pegawai oleh pemerintah kepada aparatur negara karenanya berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi tersebut dapat mendorong naiknya permintaan agregat dan memperkuat aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam meningkatnya penerimaan pajak, baik dari Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN/PPnBM), sejalan dengan temuan riset yang dilakukan oleh Kurniawan *et al*. (2020) serta Maulid *et al*. (2021).

Hasil analisis berikutnya tentang dampak belanja barang terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa belanja barang dalam jangka pendek berdampak negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini menyatakan bahwa jika belanja barang mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, sebaliknya jika belanja barang mengalami penurunan maka penerimaan pajak mengalami kenaikan. Hasil ini sejalan dengan argumen dari Listyowati & Anas (2019) serta Onifade *et al*. (2020) yang menyatakan pengeluaran pemerintah (belanja rutin) berdampak negatif dan signifikan atas pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, salah satunya yaitu terjadinya *voracity effect* di negara berkembang dengan fragmentasi politik yang tinggi atau dengan tingginya tingkat korupsi yang mengakibatkan pengeluaran tidak produktif dalam belanja publik (Bazie *et al*., 2024).

Belanja barang dalam jangka panjang diidentifikasi tidak berdampak pada penerimaan pajak. Kondisi ini menyebabkan apabila belanja barang mengalami peningkatan atau penurunan maka tidak berdampak sama sekali terhadap penerimaan pajak. Hasil ini selaras dengan temuan riset milik Kutasi & Marton (2020) bahwa belanja rutin (jaminan sosial, rekreasi, jasa ekonomi dan lainnya) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga tidak berdampak pada penerimaan pajak nantinya. Hasil ini sejalan juga dengan hasil penelitian dari Ibrahim (2020) yang menyatakan bahwa belanja rutin, termasuk belanja barang, tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Nigeria. Kondisi ini terjadi karena belanja barang tidak menambah aset dan belanja barang bersifat non-produktif sehingga tidak adanya aktivitas yang meningkatkan basis pajak.

Hasil berikutnya, belanja modal dalam jangka pendek diperoleh berdampak positif dan signifikan atas penerimaan pajak. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan belanja modal maka diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak, dan sebaliknya jika terjadi penurunan belanja modal maka berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kutasi & Marton (2020) serta Prasetyo & Bawono (2022) yang menyatakan belanja produktif (belanja modal) memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan basis dan volume penerimaan pajak. Dengan demikian, belanja modal (infrastruktur, pendidikan, kesehatan) dapat mendorong aktivitas ekonomi dan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Pada jangka panjang, belanja modal juga diperoleh memiliki dampak nilai yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, apabila belanja modal dalam jangka

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

panjang mengalami kenaikan maka bisa meningkatkan penerimaan pajak, dan sebaliknya apabila belanja modal mengalami penurunan maka penerimaan pajak juga dapat menurun. Hasil ini sejalan dengan temuan riset milik Efuntade *et al*. (2020) ataupun milik Kurniawan *et al*. (2020) yang memperoleh bahwa belanja modal pada jangka panjang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria, dan berikutnya bisa meningkatkan penerimaan pajak. Belanja modal karenanya bisa mendorong investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil terakhir dari penelitian ini adalah mengenai dampak subsidi terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis untuk periode jangka pendek menunjukkan subsidi tidak berdampak terhadap penerimaan pajak, sehingga apabila subsidi mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak berdampak sama sekali pada penerimaan pajak. Argumen ini sejalan dengan hasil studi milik Ibrahim (2020) serta milik Maulid *et al*. (2021) yang memperoleh bahwa belanja rutin (subsidi) tidak berdampak pada penerimaan pajak ataupun tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada pajak. Subsidi di Indonesia biasa diterapkan di awal tahun seperti subsidi BBM dan listrik, sehingga subsidi tidak langsung menyesuaikan realisasi penerimaan pajak. Subsidi bukan hanya meliputi rancangan kebijakan apa yang harus ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga terkait bagaimana subsidi dapat dikelola secara optimal (Ngaisah & Indrawati, 2022).

Dalam jangka panjang, subsidi dibuktikan tidak berdampak pada penerimaan pajak. Artinya, baik terjadi peningkatan maupun penurunan, subsidi tidak memberikan dampak terhadap perubahan penerimaan pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ngaisah & Indrawati (2022), Ibrahim (2020), maupun Kutasi & Marton (2020) bahwa subsidi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi ataupun pada penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah karena karakter subsidi yang rigid atau tidak fleksibel. Sebagai contoh, subsidi bahan bakar minyak (BBM) seringkali tetap diberikan meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan. Selain itu, proses penyaluran subsidi yang kurang transparan dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi, sehingga efektivitas subsidi dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak menjadi sangat terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Error Corection Model* (ECM) diperoleh dampak belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak di Indonesia memiliki variasi beragam tergantung pada jenis belanja dan jangka waktu yang digunakan. Hasil pertama yaitu belanja pegawai pada jangka pendek tidak berdampak, sedangkan belanja pegawai memberikan dampak positif signifikan dalam jangka panjang terhadap penerimaan pajak. Hasil kedua adalah belanja barang berdampak negatif dan signifikan dalam jangka pendek namun tidak signifikan dalam jangka panjang, karena adanya kemungkinan bahwa karakteristik belanja konsumtif belum menciptakan efek produktif langsung terhadap penerimaan pajak. Hasil ketiga yaitu belanja modal secara konsisten berdampak positif dan signifikan dalam kedua jangka waktu, mengindikasikan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan perluasan basis pajak. Hasil terakhir adalah subsidi tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian, belanja pemerintah terbukti berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak, dan dampak ini diidentifikasi cenderung semakin kuat dan stabil dalam jangka panjang. Kondisi ini selaras dengan pandangan teoritis mengenai peran belanja fiskal dalam mendorong penerimaan negara melalui jalur pertumbuhan ekonomi.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Keterbatasan yang dihadapi pada penelitian ini berkenaan dengan ketersediaan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia hanya mencakup periode 2005 hingga 2023, sementara data tahun 2024 tidak dapat diakses karena adanya pembatasan pada situs resmi Kementerian pada saat penelitian dilakukan. Kondisi ini menyulitkan peneliti dalam memperoleh cakupan data lebih lengkap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan data, khususnya dalam menyediakan laporan APBN yang lebih lengkap, termasuk data dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Hal ini penting untuk mendukung penelitian ekonomi makro secara lebih komprehensif. Lebih lanjut, metode ECM yang digunakan dalam penelitian ini idealnya memerlukan data runtut waktu yang panjang untuk menghasilkan estimasi hubungan jangka panjang yang akurat. Dengan jumlah observasi yang terbatas hanya 19 tahun, kemampuan model untuk menangkap dinamika jangka panjang menjadi kurang optimal.

REFERENSI

Abiad, A., Furceri, D., & Topalova, P. (2016). The macroeconomic effects of public investment: Evidence from advanced economies. *Journal of Macroeconomics*, *50*(December), 224-240. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2016.07.005.

Anugra, R., & Marwa, T. (2016). Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(1), 31–40. https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8773.

Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78.

Azwar, A. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, *20*(2), 149–167. https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186.

Basri, Y. Z., & Subri, M. (2005). *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. PT. Raja Grafindo Persada.

Basuki, A. T. (2014). *Regresi model PAM, ECM dan data panel dengan EVIEWS 7*. Katalog Dalam Terbitan (KDT). https://ekonometrikblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/10/regresi-pam-ecm-dan-data-panel.pdf.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis error correction model*. Rajawali Pers.

Bazie, P., Thiombiano, N., & Maiga, E. W. H. (2024). Allocating budget in developing countries, the need to fight corruption: Evidence from Sub-Saharan African countries. *Future Business Journal*, *10*(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s43093-023-00289-y.

Bulkani. (2018). *Statistika parametrik panduan praktis pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif*. CV IRDH. www.irdhcenter.com.

Dybczak, K., & Garcia-Escribano, M. (2019). Fiscal Implications of Government Wage Bill Spending. *IMF Working Papers*, *19*(10), 1. https://doi.org/10.5089/9781484392157.001.

Efuntade, A. O., Efuntade, O. O., & Akinola, A. O. (2020). Capital expenditure and the impact of taxation on economic growth in Nigeria. *The International Journal of Business Management and Technology*, *4*(5), 1–13. https://www.academia.edu/download/68532276/1417443099.pdf.

Fillebrown, C. B. (1914). *Taxation*. A. C. McClurg & Company. https://books.google.co.id/books/about/Taxation.html?id=wWsXAAAAYAAJ&redir_esc=y.

Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, *3*(1), 34-41.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.94.

Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Pal, M. (2019). *Basic econometrics*. McGraw-Hill India. https://openlibrary.org/books/OL33090366M/Basic_Econometrics_6th_Edition?utm_source=chatgpt.com#related-work-carousel.

Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikba, M. (2020). *Panduan praktis ekonometrika konsep dasar dan penerapan menggunakan Eviews 10*. CV. AA.Rizky.

Haug, A. A., & Sznajderska, A. (2024). Government spending multipliers: Is there a difference between government consumption and investment purchases? *Journal of Macroeconomics*, *79*(December 2023), 103584. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103584.

Hondroyiannis, G., & Papapetrou, E. (1996). An examination of the causal relationship between government spending and revenue: A cointegration analysis. *Public Choice*, *89*, 363–374. https://doi.org/10.1007/BF00159364.

Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, N. (1999). Fiscal policy and growth: Evidence from OECD countries. *Journal of Public Economics*, *74*(2), 171–190. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00022-5.

Kurniawan, T. S., & Irmawati, D. R. (2021). Analysis of the effect of employee spending, goods shopping and capital expenditure on the realization of tax revenue in Indonesia. *Media Trend*, *16*(2), 203–214. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v16i2.7690.

Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). Analisis pengaruh realisasi belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *5*(3), 171–181. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.212.

Kutasi, G., & Marton, Á. (2020). The long-term impact of public expenditures on GDP-growth. *Society and Economy*, *42*(4), 403–419. https://doi.org/10.1556/204.2020.00018.

Listyowati, L., & Anas, M. (2019). Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1988-2017: Pendekatan Error Correction Model. *Skripsi Thesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://eprints.ums.ac.id/76727/.

Maulia, I. E., Pangestoeti, W., Simangunson, D., & Ramadhan, F. R. (2024). Strategi efektif pengeluaran pemerintah: Mengoptimalkan belanja negara dan pembelian barang dan jasa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *2*(2), 167–176. https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.560.

Maulid, L. C., Bawono, I. R., & Sudibyo, Y. A. (2021). The effect of government expenditure on economic growth in Indonesia. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *16*(1), 24-38. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3172.

Meiliawati, A. (2013). Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, *5*(1), 1–18. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139.

Muhammad, I. S., & Ibrahim, M. S. (2024). Impact capital and recurrent expenditure on economi growth in Nigeria: A structural vector autoregression analysis (1994-2022). *International Journal of Management Science and Business Analysis Research*, *6*(7), 62–75. https://cambridgeresearchpub.com/ijmsbar/article/view/406.

Ngaisah, H., & Indrawati, L. R. (2022). Pengaruh ekspor, impor, dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *20*(1), 105–123. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3214.

Onifade, S. T., Çevik, S., Erdoğan, S., Asongu, S., & Bekun, F. V. (2020). An empirical retrospect of the impacts of government expenditures on economic growth: New evidence from the Nigerian economy. *Journal of Economic Structures*, *9*, Article 6. https://doi.org/10.1186/s40008-020-0186-7.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku ajar hukum pajak*. Universitas Jenderal Soedirman.

Peacock, A., & Wiseman, J. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. Princeton University Press.

Prasetyo, A., & Bawono, A. D. (2022). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, *1*, 639–646. https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/9930.

Prawitasari , A., Yodista, Y., & Hidayah, N. R. (2025). Taxation in society for development and welfare taxation in society for development and welfare. *Journal of Law, Social Science, and Management Review*, *1*(3), 101–104. https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i3.245

Ramdani, S. A. (2024). Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *5*(1), 57–77. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.524.

Sari, D. N., Jannah, R., Rizal, Y., & Andiny, P. (2024). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(4), 439–451. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2689.

Smeekes, S., & Wijler, E. (2019). High-dimensional forecasting in the presence of unit roots and cointegration. *Reports*, 1–41. http://arxiv.org/abs/1911.10552.

Thamrin. (2019). *Konsep dasar ekonomi makro*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://anyflip.com/auajk/kbdk/basic?utm_source.

Uche, E., & Ogbonna, B. (2018). Tax-and-spend , spend-and-tax , fiscal synchronization , or fiscal separation: Emerging evidence from Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, *9*(24), 68–77. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/45822.

Wahyuni, D. S., Sisdianto, E., & Bahtiar, M. Y. (2024). Analysis of the influence of state income and state expenditure on tax revenue in Indonesia 2001-2023 from the perspective of Islamic economics. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, *4*(3), 1057–1071. https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i3.457.

Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 35–55. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13.

Yossinomita, Y., Haryadi, & Hodijah, S. (2024). Determining the future direction and amount of tax revenue in Indonesia using an error correction model (ECM). *Ekonomika* , *103*(1), 56–77. https://doi.org/10.15388/Ekon.2024.103.1.4.

Yussuf, Y. C. (2022). Cointegration test for the long-run economic relationships of East Africa community: Evidence from a meta-analysis. *Asian Journal of Economics and Banking*, *6*(3), 314–336. https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0032.